

**PERAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN
KUALITAS PENDIDIKAN DI MADRASAH**

Oleh: Nurlina

Dosen IAIN Bone

Abstrak. Human resource development demands from time to time are increasing. Therefore education services must be able to keep up with these developments. Besides family and school, the community has its own role in education. The role of the community in madrasah education must be carried out jointly to improve the quality of education. So the role in education is not only educators but also the community must contribute to improving the quality of education for the betterment of the nation. Therefore, the community has an important role in achieving a quality education goal. Education as a process requires synergy between components and requires an understanding of the vision of all stakeholders involved. Support from the community is very necessary for the implementation of good education because of the community so that madrasahs will become more qualified, because of the support from the community, of course the progress of the madrasah will be reaped through the future of children in the future by involving their role in improving the quality of education services which include planning, supervision and evaluation of education programs including the field of religious education.

Keywords:The Role Of The Community In Improving Education Quality

Peran masyarakat yaitu aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bidang pendidikan dengan tujuan untuk memajukan pendidikan

dengan cara-cara tertentu. Kelompok orang yang dimaksud adalah masyarakat yang berhubungan langsung dengan pendidikan seperti orang tua siswa yang tergabung dalam komite sekolah pada madrasah, masyarakat luas yang tergabung dalam dewan pendidikan, dunia usaha seperti badan-badan usaha yang dapat berpartisipasi dalam program MBS (Manajemen Berbasis Sekolah), penyelenggara pendidikan non pemerintah, dan sebagainya. Peran masyarakat sangat diperlukan untuk peningkatan mutu pendidikan madrasah. Dalam UU Sisdiknas, pendidikan harus dilakukan secara demokratis dengan melibatkan peran masyarakat dalam proses pendidikan dari awal sampai akhir. Wujud dari peran masyarakat yaitu upaya pengawasan madrasah, penciptaan suasana yang kondusif bagi pendidikan, serta menghadirkan keteraturan sosial di masyarakat. Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, penyelenggara, pengendalian mutu dan pengguna dalam meningkatkan kualitas hasil pendidikan.

Pendidikan adalah tanggungjawab bersama antara pemerintah, orangtua, dan masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat, pendidikan tidak akan berhasil dengan maksimal. Sekarang hampir semua madrasah telah mempunyai komite sekolah yang merupakan wakil masyarakat dalam membantu madrasah, sebab masyarakat dari berbagai lapisan sosial ekonomi sudah sadar betapa pentingnya peran dan dukungan mereka untuk keberhasilan pembelajaran di madrasah. Sebetulnya banyak sekali jenis-jenis dukungan masyarakat pada madrasah. Namun sampai sekarang dukungan tersebut lebih banyak pada bidang fisik dan materi, seperti membantu pembangunan gedung, merehabilitasi sekolah, memperbaiki atap, dan lain sebagainya. Padahal masyarakat juga dapat membantu dalam bidang teknis edukatif antara lain menjadi guru bantu, sumber informasi lain, guru

pengganti, mengajar kebudayaan setempat, keterampilan tertentu, atau sebagai pengajar tradisi tertentu.

Pada dasarnya masyarakat baik yang mampu maupun yang tidak mampu, golongan atas, menengah maupun yang bawah, memiliki potensi yang sama dalam membantu madrasah untuk memberikan pembelajaran bagi anak-anak mereka. Akan tetapi hal ini bergantung pada bagaimana cara madrasah mendekati masyarakat tersebut. Oleh karena itu, madrasah harus memahami cara mendorong peran serta masyarakat agar mereka mau membantu madrasah.

A. PERAN MASYARAKAT DALAM KEMAJUAN MUTU PENDIDIKAN

Meningkatkan peran serta masyarakat memang sangat erat berkaitan dengan perubahan cara pandang masyarakat terhadap pendidikan. Tentu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Berikut peran serta masyarakat dalam madrasah untuk mutu pendidikan:

1. Peran serta dengan menggunakan jasa pelayanan yang tersedia. Jenis ini adalah jenis yang paling umum pada tingkatan masyarakat hanya memanfaatkan jasa madrasah untuk mendidik anak-anak mereka.
2. Peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga. Jenis ini masyarakat berpartisipasi dalam perawatan dan pembangunan fisik sekolah dengan menyumbangkan dana, barang, atau tenaga.
3. Peran serta secara pasif. Masyarakat dalam tingkatan ini menyetujui dan menerima apa yang diputuskan pihak madrasah (komite sekolah), misalnya komite sekolah memutuskan agar orang tua membayar iuran bagi anaknya yang bersekolah dan orang tua menerima keputusan itu dengan mematuhi.

4. Peran serta melalui adanya konsultasi. Pada tingkatan ini, orang tua datang ke sekolah untuk berkonsultasi tentang masalah pembelajaran anaknya.
5. Peran serta dalam pelayanan. Orang tua/masyarakat terlibat dalam kegiatan madrasah, misalnya orang tua ikut membantu madrasah ketika ada kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, kegiatan keagamaan, dsb.
6. Peran serta sebagai pelaksana kegiatan. Misalnya meminta orang tua/masyarakat untuk memberikan penyuluhan pentingnya pendidikan, masalah gender, gizi, dsb. Dapat pula misalnya berpartisipasi dalam mencatat anak usia sekolah di lingkungannya agar madrasah dapat menampungnya, serta menjadi narasumber, guru bantu, dsb.
7. Peran serta dalam pengambilan keputusan. Orang tua/masyarakat terlibat dalam pembahasan masalah pendidikan baik akademis maupun non akademis, dan ikut dalam proses pengambilan keputusan dalam rencana pengembangan madrasah.

a. Bentuk Hubungan Lembaga Pendidikan dengan Masyarakat

Lembaga pendidikan atau biasa disebut madrasah yaitu tempat sarana untuk menimba ilmu pendidikan. Madrasah bisa didirikan didaerah karena ada masyarakat yang ada di daerah. Sehingga madrasah tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya kontribusi dari masyarakat. Untuk menghidupkan madrasah harus ada peran masyarakat melalui peran yang nyata. Untuk itu, Lembaga pendidikan mempunyai bentuk hubungan yang sangat penting dengan masyarakat.

Ada beberapa bentuk hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat secara jelas diantaranya yaitu:

- 1) Mengikutkan warga madrasah dalam kegiatan masyarakat. Warga madrasah disini termasuk siswa. Dalam kegiatan pemasyarakatan siswa bisa

diikuti secara langsung dengan kegiatan bersama masyarakat, agar siswa dari awal mengerti dan memahami betul interaksi sosial di luar madrasah seperti apa wujudnya. Sehingga nantinya siswa tidak merasa canggung bila berhadapan dengan masyarakat yang luas.

2) Penyediaan fasilitas madrasah untuk keperluan masyarakat. Madrasah bisa memberikan bantuan berupa fasilitas kepada masyarakat untuk keperluan yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Sehingga masyarakat tidak bersusah payah dalam penyewaan tempat karena di madrasah yang ada di masyarakat tersebut sudah mau memberikan fasilitas tempat untuk menunjang keperluan masyarakat tersebut.

3) Mendayagunakan tokoh-tokoh potensial dalam masyarakat guna menunjang pendidikan. Misalnya dalam bentuk penanaman materi-materi yang penting bagi siswa dan guru merasa kemampuannya dibidang materi itu belum menguasai betul. Sehingga memerlukan tokoh-tokoh dalam masyarakat tersebut untuk membantu memberikan materi.

4) Mengikutsertakan madrasah dalam menunjang pelaksanaan pendidikan, yaitu mengikutkan warga madrasah dalam pelaksanaan pendidikan yang ada di dalam lingkup madrasah maupun pelayanan pendidikan. Selain itu masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil.

b. Masalah Pengembangan Pendidikan di Indonesia

Secara singkat pendidikan merupakan produk masyarakat. Pendidikan merupakan proses transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan dan aspek-aspek perilaku lainnya kepada generasi ke generasi. Pengertian ini, merupakan upaya yang dilakukan sepenuhnya oleh kekuatan-kekuatan masyarakat. Segala sesuatu yang dipelajari hasil interaksi dengan orang lain, baik di rumah, madrasah, tempat permainan, pekerjaan dan

sebagainya. Segala sesuatu yang diketahui ternyata adalah hasil hubungan timbal balik yang telah sedemikian rupa dibentuk oleh masyarakat sekitar lingkungan. Bagi suatu masyarakat, hakikat pendidikan diharapkan mampu berfungsi menunjang bagi kelangsungan dan proses kemajuan hidupnya.

Agar masyarakat dapat melanjutkan eksistensinya, maka diteruskan nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan dan bentuk tata perilaku lainnya kepada generasi muda. Tiap masyarakat selalu berupaya meneruskan kebudayaan dengan proses adaptasi tertentu berdasarkan ciri masing-masing dengan zamannya kepada generasi muda melalui pendidikan, atau secara khusus melalui interaksi sosial. Dengan demikian fungsi pendidikan tidak lain adalah sebagai proses sosialisasi (Nasution, 1999).¹ Dalam pengertian sosialisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa aktivitas pendidikan sebenarnya sudah dimulai semenjak seorang individu pertama kali berinteraksi dengan lingkungan eksternal di luarnya, yakni keluarga.

B. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

Dengan adanya kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang Undang-Undang Otonomi Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, berarti bagi setiap daerah diberikan kebebasan untuk mengelola daerahnya masing-masing. Kebijakan ini juga secara otomatis memberikan kebebasan bagi pengelolaan pendidikan. Perubahan paradigma pemerintah dari sentralisasi ke desentralisasi membuka peluang masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan pendidikan.

¹ Nasution, Arman Hakim., [1999], *“Perencanaan dan Pengendalian Produksi”*, Guna Wijaya, Jakarta.

Demikian juga seperti yang disampaikan Dirjen Dikdasmen bahwa penyaluran aspirasi serta kontribusi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), di tingkat kota/kabupaten dinamakan Dewan Pendidikan dan tingkat sekolah dinamakan Komite Sekolah (Depdiknas, 2002). Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nomor 044/V/2002 tentang pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah maka otonomi sekolah bermitra kerja dengan Komite Sekolah. Peran Komite Sekolah pada madrasah memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan, mendukung penyelenggaraan pendidikan, mengontrol, mediator antara pemerintah dan masyarakat. Di samping itu, juga berfungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap pendidikan bermutu, melakukan kerja sama dengan masyarakat, menampung dan menganalisa aspirasi, memberi masukan, mendorong orang tua peserta didik dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan, menggalang dana masyarakat dan melakukan evaluasi.

Adapun peran Komite Sekolah pada Madrasah secara umum adalah:

1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
2. Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
4. Mediator (*mediator agency*) antara pemerintah (*eksekutif*) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Masyarakat dapat memahami fungsinya untuk mengawasi dan membantu madrasah dalam pengelolaan termasuk dalam kegiatan pembelajaran. Ada hal yang perlu diantisipasi, yaitu dengan besarnya peranan masyarakat dalam pengelolaan madrasah tersebut, mungkin dapat menimbulkan rancunya kepentingan antar madrasah, orang tua, dan masyarakat. Untuk mencegah agar tidak terjadi kerancuan kepentingan antar madrasah, orang tua dan masyarakat, maka madrasah atau pemerintah daerah perlu merumuskan batas-batas peranan atau pembagian tugas masing-masing unsur madrasah, orang tua dan masyarakat secara rinci, jelas, dan tegas, sehingga unsur tersebut dapat melaksanakan fungsi dan tugas masing-masing dalam pengelolaan madrasah (Sanaky, 2003).²

a. Beberapa Permasalahan Pada Komite Sekolah di Madrasah

Keputusan Mendiknas Nomor 44/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite sekolah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan komite sekolah adalah mitra sekolah. Tugas komite sekolah di madrasah pada dasarnya mempunyai empat peran yaitu, memberikan pertimbangan, memberikan dukungan, melakukan pengawasan dan menjadi mediator dengan masyarakat dan pemerintah.

Peran tersebut pada dasarnya sudah banyak dilakukan oleh pengurus komite sekolah di madrasah, namun belum optimal. Karena lembaga komite sekolah di madrasah telah ada dan dibentuk setiap madrasah di Indonesia. Tetapi keberadaan komite sekolah di madrasah terutama di daerah tertinggal masih banyak menghadapi beberapa kendala. Ada beberapa masalah pokok

²Sanaky. Hujair AH. 2003, *Paradigma Pendidikan Islam Membangun Masyarakat Madani Indonesia*. Yogyakarta : Safria Insani Press.

yang sering ditemui di lapangan tentang komite yang akhirnya perannya dikatakan belum optimal.

Permasalahan tersebut antara lain:

1. Masalah Pemahaman

Pemahaman tentang komite sekolah di madrasah sangat beragam, tentang perannya belum sepenuhnya dipahami apalagi menjalankan peran tersebut secara maksimal. Proses pembentukannya pun mungkin belum berdasarkan acuan yang ada. Wakil dalam susunan anggota komite juga belum meluas atau belum mengikut sertakan dunia usaha ataupun dunia industri di sekitarnya. Di samping itu masih langka perwakilan perempuan dalam komite sekolah. Yang sangat fatal lagi komite sekolah di madrasah belum mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga komite.

2. Masalah Budaya

Masalah budaya adalah cara berfikir serta bertindak masyarakat terhadap madrasah. Pola pikir mereka kebanyakan menganggap madrasah sebagai lembaga jasa dan masyarakat sebagai konsumen. Madrasah jual lulusan, masyarakat membayar. Pola pikir lainnya adalah madrasah bagi anak-anak adalah pilihan masa depan. Dengan demikian masyarakat yang mampu, menyekolahkan anaknya di sekolah yang berkualitas. Apalagi jika anaknya mempunyai prestasi. Bagaimana dengan masyarakat yang miskin, jelas madrasah bukan menjadi prioritas yang utama, madrasah bukan merupakan tanggung jawabnya sehingga madrasah mempunyai urutan prioritas di bawah ke butuhan utama (makan, papan, sandang). Pola pikir terhadap madrasah masih terbatas pada dukungan dana semata (sangat minim di daerah tertinggal). Perubahan budaya ini diperlukan proses yang sangat panjang agar tuntutan peran komite sekolah di madrasah dapat optimal.

3. Masalah Pembinaan

Komite sekolah di madrasah yang merupakan lembaga representatif masyarakat untuk madrasah sudah lama ada semenjak adanya BP3, POMG, yang terakhir adalah Komite sekolah di madrasah sampai saat ini lembaga tersebut, belum dapat berfungsi dengan baik.

4. Masalah Sosial Ekonomi

Belum optimalnya peran komite sekolah di madrasah disebabkan juga oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah. Segala upaya yang dilakukan oleh masyarakat masih difokuskan mencari solusi ekonomi rumah tangga, sehingga walaupun terlibat dalam kepengurusan komite, partisipasinya belumlah optimal dianggap sebagai beban sampingan, apalagi didalam komite bersifat sukarelawan. Masalah kemiskinan itu sendiri sudah menyulitkan mereka untuk terlihat dalam komite sekolah pada madrasah juga menanggung beban karena berbagai ide untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan prasarana madrasah menjadi lamban.

Beberapa masalah di atas jika diperhatikan dan ditelusuri secara lebih operasional banyak permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam rangka pemberdayaan komite sekolah di madrasah diantaranya adalah pemahaman tentang komite sekolah di madrasah belum tersosialisasikan dengan efektif di tengah masyarakat. Komite sekolah di madrasah yang dibentuk di era reformasi pada hakekatnya masih sama dengan BP3 atau POMG. Di sisi lain banyak komite belum mampu menjalankan fungsi-fungsi manajemen organisasi komite dengan baik, inisiatif rendah, ketergantungan kepada madrasah masih tinggi, termasuk menganggap tidak penting adanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi sebuah komite sekolah di madrasah.

C. EFEKTIFITAS PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN

Salah satu cara yang dapat dilakukan dengan memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat yaitu madrasah harus dapat membina kerjasama dengan orangtua dan masyarakat, menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik dan warga madrasah. Itu sebabnya paradigma Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) mengandung makna sebagai manajemen partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat, sehingga semua kebijakan dan keputusan yang diambil adalah kebijakan dan keputusan bersama, untuk mencapai keberhasilan bersama.

Dengan demikian, prinsip kemandirian dalam MBS adalah kemandirian dalam nuansa kebersamaan, dan hal ini merupakan aplikasi dari prinsip-prinsip yang disebut sebagai *total quality management*, melalui suatu mekanisme yang menekankan pada mobilisasi kekuatan secara sinergis yang mengarah pada satu tujuan, yaitu peningkatan mutu dan kesesuaian pendidikan dengan pengembangan masyarakat. Melihat realitas saat ini terjadi seharusnya komite sekolah di madrasah yang merupakan representasi partisipasi masyarakat dalam praktik pendidikan dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat setempat.

Oleh karena itu komite sekolah di madrasah yang dibangun harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Artinya, komite sekolah di madrasah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada penggunaan (*client model*), berbagi kewenangan (*power sharing and advocacy*) dan kemitraan (*partnership model*) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan.

a. Persoalan Mutu Pendidikan

Persoalan mutu dan kualitas pendidikan menjadi perdebatan yang tidak pernah sepi untuk dibicarakan. Selama ini persoalan mutu dan kualitas pendidikan selalu dihubungkan dengan perangkat kurikulum, sarana dan prasarana, serta kinerja guru, peran masyarakat jarang untuk disentuh. Padahal jika dikaji lebih jauh maka masyarakat secara umum ataupun dalam bentuk representasi seperti dewan pendidikan dan komite sekolah di madrasah juga bisa memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Peran masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan selama ini kurang maksimal dikarenakan dua faktor utama.

Pertama adalah tingkat pemahaman sebagian dewan pendidikan dan anggota komite sekolah di madrasah yang masih kurang tentang tugas pokok, fungsi, dan peran dalam posisi masing-masing. Hal tersebut terlihat ketika banyak kegiatan yang dilakukan masih terbatas pada masalah teknis seperti pembangunan, iuran membayar ujian, buku, dan pengumuman kelulusan. Padahal jika dipahami peran dewan pendidikan dan komite sekolah di madrasah dimulai sejak persiapan, proses, dan evaluasi. Selain persoalan tugas pokok, dan fungsi pemahaman tentang paradigma pendidikan juga belum sama dan merata. Persoalan ini akan berakibat pada ketidakpekaan dewan pendidikan dan komite sekolah untuk merespon perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan.

Kedua adalah hambatan psikologis yang muncul dari madrasah. Hambatan psikologis ini nampak pada tingkat keterbukaan madrasah terhadap perubahan yang ada diluar sangat kecil. Sekolah madrasah seolah-olah menjadi lembaga tersendiri yang terpisah dari masyarakat, padahal output dari pendidikan madrasah akan kembali ke masyarakat. Madrasah merasa memiliki sistem tersendiri yang hanya bisa dijalankan oleh mereka

sendiri. Dampak dari hal ini adalah ketika ada rapat madrasah dengan para wali murid atau komite sekolah di madrasah lebih bersifat mekanis, madrasah menyampaikan keputusan yang sudah jadi kepada wali murid atau komite. Padahal mengacu pada peraturan yang ada, seharusnya forum rapat madrasah dengan wali murid atau komite sekolah pada madrasah adalah forum musyawarah untuk mendiskusikan berbagai hal tentang peningkatan kualitas pendidikan.

b. Madrasah dan Pemberdayaan Peran Masyarakat

Upaya untuk meningkatkan kualitas dan keberadaan madrasah tersebut, dalam perkembangannya tidak pernah lepas dari probelmatika yang dihadapi. Sebagai suatu inovasi dalam sistem pendidikan Islam, ada beberapa problematika yang dihadapi oleh madrasah :

1. Dengan inovasi struktur dan kurikulum yang diajarkan, madrasah seolah telah kehilangan akar sejarahnya, artinya keberadaan madrasah bukan merupakan kelanjutan dari pesantren, meskipun diakui bahwa pesantren merupakan bentuk lembaga pendidikan Islam pertama di Indonesia.
2. Terdapat dualisme pemaknaan terhadap madrasah. Di satu sisi, madrasah diidentikkan dengan sekolah umum karena memiliki muatan kurikulum yang relatif sama dengan sekolah umum. Di sisi lain, madrasah dianggap sebagai pesantren dengan sistem pendidikan klasikal yang kemudian dikenal dengan madrasah diniyah.
3. Muatan kurikulum yang relatif sama dengan muatan kurikulum di sekolah, menjadikan madrasah kurang memiliki jati diri sebagai lembaga yang mencetak ahli-ahli agama.
4. Dengan pengertian beberapa madrasah yang ada, mengakibatkan berkurangnya peran serta masyarakat terhadap madrasah. Ada suatu

anggapan bahwa setelah dinegerikan, maka semua tanggungjawab berada pada pemerintah, sehingga masyarakat lepas sama sekali.

5. Kendatipun status madrasah sudah disamakan dengan sekolah umum, namun dalam realitasnya keberadaan madrasah tetap dianggap sebagai pendidikan kelas dua, baik dari segi kualitas akademik, maupun sarana dan prasarana.

Sering dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat terhadap otonomi daerah, maka sebagian besar urusan pemerintah akan didesentralisasikan kepada daerah setempat. Di antara urusan yang didesentralisasikan adalah masalah pendidikan. Untuk menunjang suksesnya pendidikan berbasis masyarakat, maka peranan masyarakat sangat besar sekali. Masyarakat sebagai obyek pendidikan sekaligus juga akan menjadi subyek pendidikan. Sebagai obyek pendidikan, masyarakat merupakan sasaran garapan dari dunia pendidikan dan sebagai subyek pendidikan, masyarakat berhak mendesain model pendidikan sesuai dengan potensi dan harapan yang diinginkan oleh masyarakat setempat. Lebih dari itu sebagai subyek pendidikan, masyarakat juga bertanggungjawab terhadap prospek, termasuk dana pendidikan.

Ada beberapa bentuk peran serta masyarakat dalam menunjang keberhasilan otonomi dalam bidang pendidikan, antara lain :

1. Pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah.
2. Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga kependidikan.
3. Pengadaan dan pemberian tenaga ahli (guru tamu, peneliti, dan sebagainya).
4. Pengadaan/penyelenggaraan program pendidikan yang belum diadakan oleh sekolah.

5. Pengadaan bantuan dana; wakaf, hibah, pinjaman, beasiswa dan sebagainya.

6. Pengadaan dan pemberian bantuan ruang, gedung, tanah dan sebagainya.

7. Pemberian bantuan buku-buku pelajaran.

8. Pemberian kesempatan untuk magang/latihan kerja.

9. Pemberian bantuan manajemen pendidikan.

10. Bantuan pemikiran dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pendidikan.

11. Kerjasama dalam penelitian dan sebagainya.

Sedangkan partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi program pembangunan. Hal itu sesuai pula dengan hak masyarakat dalam pendidikan yaitu mereka dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.

c. Peranan Masyarakat dalam Pendidikan Agama

Berdasarkan pada tantangan yang dihadapi pendidikan agama dan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, maka bentuk-bentuk peranan masyarakat dalam meningkatkan pendidikan agama adalah sebagai berikut:

1. Revitalisasi dan reorientasi pendidikan agama di keluarga.

Anggota keluarga yang terdiri dari individu-individu masyarakat, memiliki peranan yang strategis dalam memberikan penguatan terhadap pendidikan agama. Tanggung jawab orang tua dalam memberikan pendidikan agama terhadap anggota keluarga akan memberi dampak yang paling nyata dalam peningkatan pendidikan agama, dengan contoh suri teladan yang baik dalam perilaku keagamaan keluarga, akan lebih efektif

dalam proses pencapaian tujuan pendidikan agama, yaitu menjadikan pribadi yang sempurna berkeperibadian islami.

Di tengah-tengah terjadinya disfungsi keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama dan utama, adalah peranan nyata anggota masyarakat saat ini untuk mengembalikan fungsinya sebagai “*madrosatul ula*”. Fungsi-fungsi anggota keluarga harus kembali mendapat penguatan, apakah itu sebagai ayah, ibu maupun anak, yang merupakan lingkungan terkecil dari suatu masyarakat.

2. Pembiayaan, pemberian bahan dan sarana pendidikan agama dan keagamaan.

Salah satu peluang untuk peran serta masyarakat dalam meningkatkan pendidikan agama dan keagamaan adalah dalam hal pembiayaan pendidikannya. Sebagaimana dimaklumi bahwa terutama pendidikan formal yang bercorak keislaman yang dibawah naungan Kementerian Agama RI seperti: RA, MI, M.Ts, MA atau sejenisnya masih cukup memperhatikan, apabila dibandingkan dengan pendidikan umum di bawah naungan kemendiknas RI, rata-rata pembiayaan satuan pendidikan agama (*unit cost*) tersebut, hanya 38% yang ditanggung pemerintah, selebihnya (62 %) masih ditanggung anggota masyarakat (orang tua) . Hal tersebut menunjukkan contoh konkret peran serta masyarakat sekaligus kemandirian madrasah yang harus dipertahankan sekaligus ditingkatkan. Peran serta masyarakat juga dapat berupa wakaf tanah untuk penambahan bangunan madrasah, sarana penunjang pendidikan agama, seperti masjid madrasah, dan sarana penunjang lainnya. Sebagaimana pernah dilakukan pula oleh masyarakat pada masa pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid, dimana sarjana Baitul Hikmah melakukan gerakan wakaf tanah untuk fasilitas pendidikan, seperti perpustakaan, dll. Wakaf pada asalnya adalah

bertujuan mengekalkan yang asal dan memanfaatkannya untuk kebaikan, atau harta yang dapat digunakan hasilnya tetapi asalnya kekal.

3. Penguatan *Learning Society* dalam pendidikan agama.

Salah satu sarana potensial dalam penguatan *learning society* adalah Masjid, Musholla, Langgar dan sejenisnya. Dapat dipastikan hampir tiap RW memiliki Masjid atau Musholla, yang secara umum mempunyai jama'ah masing-masing (yang terdiri dari anggota masyarakat). Masjid telah berfungsi sebagai tempat belajar masyarakat untuk meningkatkan wawasan keagamaan/keislaman. Pusat-pusat pembelajaran masyarakat tentang agama telah berdiri di Masjid selama berabad-abad sehingga sampai sekarang. Namun di era teknologi informasi global hampir seluruh lapisan kehidupan, seperti tradisi mengaji di masjid, musholla dan langgar pada saat ini berkurang. Jutaan mata masyarakat muslim yang biasa belajar agama selepas shalat magrib sambil menunggu shalat isya. Sekarang telah beralih di depan televisi, menonton sinetron dan atau jalan-jalan ke mall.

4. Berpartisipasi aktif dalam komite sekolah di madrasah.

Salah satu sarana untuk berperan serta dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama adalah masyarakat dapat berperan aktif di komite sekolah di madrasah sebagaimana diatur dalam pasal 56 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, bahwa masyarakat dapat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan, termasuk di dalamnya bidang pendidikan agama.

5. Mendorong dan mendukung semua program pendidikan agama di madrasah.

Peran serta masyarakat untuk meningkatkan pendidikan agama juga dapat dilakukan dengan mendukung semua kebijakan madrasah yang terkait peningkatan mutu pendidikan agama, baik melalui program kurikuler,

misalnya adanya jam tambahan khusus jam pelajaran agama (Membaca Alqur'an setiap hari pada awal pembelajaran, seperti di Al-Azhar, dan Islamic Fullday School, atau beberapa sekolah umum lainnya, membiasakan berbusana muslim di sekolah umum, juga dapat mendukung dalam program ekstrakurikuler, seperti Studi Islam Intensif, Pesantren Kilat, dll.

6. Mendirikan dan mengembangkan lembaga pendidikan agama yang berbasis mutu.

Diakui atau tidak, lembaga pendidikan agama Islam, secara umum masih dianggap lembaga pendidikan nomor dua jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum lainnya. Dan hal ini pula yang menjadi keprihatinan para pengamat pendidikan islam. Maka salah satu peran serta aktif masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan agama adalah dengan mendirikan dan mengembangkan lembaga pendidikan agama yang berbasis mutu.

Untuk menjadikan lembaga pendidikan agama dan keagamaan seperti madrasah yang bermutu, maka menurut Afifuddin aspek-aspek suatu madrasah dipersyaratkan mempunyai standar mutu pula, antara lain aspek administrasi dan manajemen, aspek Ketenagaan, aspek kesiswaan, aspek kultur belajar, aspek sarana dan prasarana.

C. PENUTUP

Peran masyarakat sangat diperlukan untuk peningkatan mutu pendidikan madrasah, didalam UU Sisdiknas, pendidikan harus dilakukan secara demokratis dengan melibatkan peran masyarakat dalam semua proses pendidikan dari awal sampai akhir. Partisipasi merupakan proses eksternalisasi individu. Bagi madrasah partisipasi masyarakat dalam

pembangunan pendidikan adalah kenyataan objektif yang dalam pemahamannya ditentukan oleh kondisi subjektif orang tua siswa.

Secara garis besar peningkatan peran masyarakat dalam pemberdayaan dan peningkatan pendidikan keagamaan dapat melalui peningkatan peran masyarakat dalam pemberdayaan manajemen pendidikan yang dikenal MBS yang bertujuan untuk peningkatan pengembangan manajemen yang lebih *accountable*, baik dari segi keuangan maupun organisasi pendidikan itu sendiri. Melalui peningkatan ini, sumber-sumber finansial masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara lebih efisien untuk pemberdayaan dan peningkatan kualitas pendidikan Islam. Begitu juga dari segi organisasi, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pendidikan yang berkualitas, yang pada gilirannya akan mendorong perkembangan madrasah dan lembaga-lembaga pendidikan islam lainnya yang menghasilkan output yang berparadigma keilmuan komprehensif, yakni pengetahuan umum dan agama.

Diakui atau tidak, lembaga pendidikan agama Islam, secara umum masih dianggap lembaga pendidikan nomor dua jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum lainnya. Hal ini pula yang menjadi keprihatinan para pengamat pendidikan islam. Maka salah satu peran serta aktif masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan agama adalah dengan mendirikan dan mengembangkan lembaga pendidikan agama yang berbasis mutu. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber belajar lain yang dapat dalam masyarakat, sehingga sistem pendidikan Islam tidak terpisah, atau menjadi bagian integral dari masyarakat muslim secara keseluruhan.

DAFTAR RUJUKAN

- Depdiknas. 2002. *Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*. Jakarta : Ditjen Dikdasmen.
- Hasbullah. 2011. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers
- <http://harmadi-derasid.blogspot.com/2009/01/peran-serta-masyarakat-dalam-pendidikan>. diakses 19 Juli 2014.
- I Nyoman Temon Astawa. 2017. *Memahami Peran Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Kemajuan Mutu Pendidikan Di Indonesia*. Jurnal Penjaminan Mutu Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.
- Imron, Ali. 2002. *Kebijaksanaan Pendidikan Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Malayu Hasibuan. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Nasution, Arman Hakim., [1999], *Perencanaan dan Pengendalian Produksi*. Jakarta: Guna Wijaya.
- Pidarta, Made. 1997. *Landasan Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
- Sam M. Chan dan TutiT. Sam. 2005. *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sanaky. Hujair AH. 2003. *Paradigma Pendidikan Islam Membangun Masyarakat Madani Indonesia*. Yogyakarta: Safria Insani Press.
- Siti Irene Astuti Dwiningrum. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharsimi Arikunto; 2013. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta : Aditya Media.